

Keberhasilan dan Kegagalan Komunikasi Publik: Aspek Dakwah pada Gerakan 212 di Jakarta dan Gerakan Pemurnian Islam di Lombok

Muhammad Irhamdi; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; irhamsatariah@gmail.com

Abstract

The practice of da'wa in a democratic society is often used as a tool to influence public policy through political means. This is often the case because the practice of da'wa is relatively easy to be exploited by politicians. They often transform religious messages of da'wa into political ones without losing their attractiveness before the audience. The aim of this paper is, therefore, to answer two inter-related questions; (1) how political messages masked with religious symbols become effective and therefore are able to influence public policy and (2) how such messages become not effective and therefore are not able to influence public policy. To answer those questions, success story in the case of 212 movement in Jakarta and a failure story in the case of religious purification of Islam in Lombok are analyzed to find elements that play important roles regarding the success and failure of a da'wa movement to influence public policy.

Keywords: Diffusion of political messages, Islamic Da'wa, Public communication, and Public policy.

Abstrak

Praktek dakwah pada masyarakat yang menganut demokrasi seringkali dijadikan alat untuk mempengaruhi kebijakan politik dan kebijakan public yang menjadi turunannya. Hal ini dilakukan karena praktek dakwah dapat dengan mudah dimodifikasi oleh para pelaku dakwah menjadi ajang penyampaian pesan-pesan politik yang dibalut dengan kemasan agama sehingga menjadi lebih menarik di hadapan khalayak. Paper ini bertujuan untuk menjelaskan dua hal yang saling berkaitan, yaitu (1) bagaimana pesan-pesan politik yang dibalut oleh kemasan agama dapat menjadi efektif dan karenanya berhasil mempengaruhi kebijakan public, dan (2) bagaimana pesan-pesan dengan genre yang sama dapat menjadi tidak efektif dan karenanya tidak mampu mempengaruhi kebijakan publik. Untuk menjawab dua masalah di atas, keberhasilan para pelaku dakwah pada kasus gerakan 212 di Jakarta dan kegagalan para pelaku dakwah pada kasus pemurnian Islam di Lombok akan digunakan untuk mengetahui elemen-elemen apa saja yang menentukan efektif atau tidaknya sebuah gerakan dakwah yang berkelindan dengan penyampaian pesan-pesan politik untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Kata Kunci: Dakwah Islam, Kebijakan publik, Komunikasi publik, dan Penyebaran pesan politik.

A. Latar Belakang

Dalam sistem politik, komunikasi publik penting perannya untuk memberikan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi tentang gagasan-gagasan ataupun ide-ide yang dianggap penting untuk perkembangan kemajuan politik dan memperkuat sistem politik demi tercapainya tujuan bersama untuk kepentingan bersama. Dalam sistem politik demokrasi, komunikasi publik sangat esensial untuk keutuhan dan stabilitas demokarasi, melalui komunikasi publik masyarakat bisa memberikan kritikan-kritikan atau masukan-masukan yang bermanfaat untuk kemajuan sebuah sistem.⁶²

Sangat erat kaitannya hubungan komunikasi publik dan sistem politik dalam upaya untuk mempengaruhi dan memberikan sebuah propaganda pada sebuah sistem terkait isu-isu apapun yang dapat mempengaruhi sistem politik dengan kekuatan informasi yang diberikan kepada publik ataupun pada saat yang bersamaan kekuatan isu, ide dan gagasan tidak dapat mempengaruhi sistem jika ide dan gagasan tersebut tidak bisa memenuhi kepentingan bersama pada sebuah sistem. Untuk dapat diterima sebuah pesan publik oleh masyarakat luas tentu memiliki kreteria yang berbeda beda disebabkan tingkat pendidikan dan pengalaman masyarakat yang berbeda pula. Pada suatu situasi dan kondisi komunikasi publik dapat diterima bukan karena kekuatan pesannya akan tetapi diterima karena masyarakat melihat siapa komunikator publiknya, komunikator publik dan pesan komunikasi publik adalah unsur penting untuk dapat diterima bahkan tidak dapat diterima oleh masyarakat luas.

Isu-isu tentang pengaruh komunikasi publik tetap menarik dan relevan untuk didiskusikan, dalam paper ini penulis berusaha mengeksplorasi hubungan antara komunikasi publik dengan sistem politik. Hipotesa penulis tentang hubungan komunikasi publik dan sistem politik ialah terdapat hubungan yang erat antara

⁶² Kajian kepustakaan yang cukup komprehensif mengenai peran komunikasi politik dalam membentuk interaksi warga dalam ruang demokrasi dapat dilihat pada Peter Van Aelst et al., "Political Communication in a High-Choice Media Environment: A Challenge for Democracy?," *Annals of the International Communication Association* 41, no. 1 (January 2, 2017): 3–27, <https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551>.

kedua hal tersebut, terutama dalam kaitannya dengan peran komunikasi politik dalam upaya mempengaruhi kebijakan public.

Meski demikian, komunikasi politik tidak selamanya dapat mempengaruhi publik untuk berpikir dan berimajinasi seperti yang direncanakan oleh komunikator politik dalam upayanya yang persuasive. Dalam paper ini, penulis mengangkat beberapa contoh yang berasal dari masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) di mana orang-orang dalam masyarakat tersebut masih tetap melakukan aktifitas-aktifitas kebudayaan sebagai sebuah adat-istiadat di tengah gencarnya proses dekulturalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengatasnamakan pemurnian agama.

Masyarakat KLU masih tetap kukuh dengan tradisi turun-temurunnya, yaitu melakukan lebaran adat selama satu hari setelah Hari Raya Iedul Fitri dengan cara pelaksanaan yang masih tradisional dan sedikit berbeda dengan pelaksanaan dan perayaan Iedul Fitri pada umumnya. Aktifitas tersebut menurut sebagian orang adalah aktifitas sia-sia karena banyak memakan biaya. Bahkan, menurut sebagian orang Islam yang berinteraksi dengan masyarakat KLU yang merayakannya, perayaan Iedul Fitri secara tradisional pada masyarakat adat di KLU tersebut adalah tergolong dosa besar, yaitu *syirik (syirk)*⁶³.

Di tengah gencarnya usaha persuasi (dan dalam beberapa kasus prosekusi) yang dilakukan oleh sejumlah komunikator public seperti para “da’i keliling” yang mana di dalam setiap pesan-pesan politiknya mengisyaratkan agar masyarakat adat untuk berhenti melakukan hal-hal yang sia-sia dan banyak memakan biaya seperti itu, tetap saja, upaya komunikasi publik yang dilakukan oleh para da’i tersebut tidak dapat mempengaruhi sistem politik yang dibangun dalam sebuah kebudayaan yang terbangun untuk memenuhi kebutuhan akan adanya perasaan memiliki tujuan bersama.⁶⁴

⁶³ Syirik adalah perbuatan enyekutkan Allah dengan selain daripada-Nya. Penyekutuan Allah ini adalah salah satu perbuatan paling tercela dalam agama Islam. Menurut sejumlah ayat dalam al-Qur’an maupun hadist-hadist nabi, perbuatan syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah.

⁶⁴ Zaki Yamani Athhar, “Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok,” *ULUMUNA* 9, no. 1 (June 10, 2005): 70, <https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.443>.

Di sisi lain, komunikasi publik dapat mempengaruhi sistem politik. Hal ini sebagaimana yang tampak dari komunikasi yang dilakukan oleh komunikator publik Riziek Shihab di mana dia mampu memobilisasi masa dengan isi komunikasinya terkait dengan penistaan al-Quran yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Riziek Sihab mampu mempengaruhi sistem politik hingga berujung pada perdebatan yang sangat panjang. Ada beberapa faktor yang membuat komunikasi politik mampu ataupun tidak mampu mempengaruhi sistem politik, baik itu sistem yang formal pada lembaga Negara ataupun sistem yang non formal yaitu kelompok-kelompok kebudayaan yang berkumpul dengan satu gagasan untuk satu tujuan bersama.⁶⁵

B. Sistem Politik dan Kebijakan Publik: Memposisikan Pesan Sakral Dakwah dalam Arena Profan Publik

Terdapat sejumlah penjelasan yang diajukan oleh para ahli untuk menunjukkan bagaimana sistem politik dan kebijakan public di sebuah wilayah saling mempengaruhi secara erat antara satu dengan yang lain. Dua hal tersebut, selain berkaitan secara erat, juga merupakan dua pilar yang sama pentingnya dalam membangun dan mempertahankan tegaknya demokrasi di sebuah wilayah berdaulat dari berbagai ancaman yang mungkin datang dari luar. Sistem politik dan kebijakan public memainkan peran yang sama pentingnya bagi masyarakat luas, yaitu menciptakan dunia yang sejahtera melalui penjagaan atas situasi politik dan social yang stabil.⁶⁶

Ketika seseorang berusaha untuk meraih kesejahteraan pribadinya melalui berbagai sumber daya yang tersedia dalam lingkungan sosialnya, dan ketika mereka berupaya untuk mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka melihat dirinya sibuk dalam kegiatan (aktivitas) politik. Hal ini menggambarkan luasnya spectrum politik yang merentang dari mikro politik sampai pada makro politik.

⁶⁵ Muhammad Wildan, "Islamism and Democratization in the Post 411 and 212 Rallies of Indonesia," *Thinking ASEAN*, January 2016.

⁶⁶ Lihat, Thomas A. Birkland, *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*, 3rd ed (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2010).

Maksudi, seorang pengamat politik di Indonesia, berupaya untuk menjelaskan proses politik dengan merunut asal kata dari istilah tersebut. Secara sederhana Maksudi menyebut bahwa politik berasal dari istilah “*Polis*” dan “*Polistaia*”. *Polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan *taia* berarti “urusan”. Dari kata polis tersebut dapat diketahui bahwa “politik” merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat.⁶⁷

Dalam satu kelompok masyarakat yang terikat pada satu ideology, tuntutan untuk mempertahankan sebuah nilai demi terwujudnya tujuan bersama harus mampu menembus batas-batas identitas ekonomi, strata sosial dan agama. Kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda tersebut kemudian berinteraksi membentuk satu kesatuan yang lebih integratif untuk tetap dapat mempertahankan eksistensinya masing-masing dan untuk mewujudkan nilai-nilai yang telah disepakati baik dalam level intra kelompok maupun pada level antar kelompok. Secara jangka panjang, seluruh kesatuan system politik tersebut harus mampu menjamin terciptanya kemaslahatan dan terpenuhinya segala kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh kelompok masyarakat yang terlibat dalam interaksi tersebut.

Ahli lain, Easton, mengamati kehidupan politik sebagai suatu jalinan interaksi sebagai suatu sistem. Lebih lanjut Easton menjelaskan bahwa yang membedakan sistem politik dengan sistem lainnya terletak pada aspek pendefinisian istilah politik itu sendiri. Dalam hal ini, ia mengajukan penjelasan yang lebih universal dengan mengemukakan bahwa sistem politik adalah nilai agregat dari perjuangan individu-individu atau kelompok-kelompok individu dalam pertarungan menguasai nilai-nilai social yang dipatuhi di tengah masyarakat.⁶⁸

Untuk menjamin bekerjanya sistem politik diperlukan keteraturan dalam mekanisme input-output politik. Input terdiri atas tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*). Dalam sistem politik input diperlukan sebagai sumber energi sistem politik oleh karena masyarakat dengan beragam kebutuhan, tingkat pendidikan.

⁶⁷ Beddy Irawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 8-10.

⁶⁸ Lihat, David Easton, John G Gunnel, and Luigi Graziano, *The Development of Political Science: A Comparative Survey* (London; New York: Routledge, 2002).

Demands yang telah diseleksi akan akan mengalami proses dan hasilnya adalah output berupa keputusan, tindakan, maupun kebijakan tertentu. Jika output sesuai dengan yang diharapkan maka akan terjadi pembaharuan dukungan. Akan tetapi, apabila output yang dihasilkan tidak sesuai maka akan terjadi erosi dukungan akhirnya dapat mengganggu ketidakstabilan sistem.⁶⁹

Komunikasi publik menjadi sesuatu yang urgen dalam sistem politik guna memperkuat dan mempengaruhi sistem supaya bertindak sesuai dengan nilai dan kesepakatan yang telah dibangun untuk seperangkat tujuan yang telah dibangun melalui serangkaian panjang interaksi sosiopolitik di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dalam sebuah entitas sosial. Komunikasi publik pada sistem politik bertujuan untuk mempengaruhi dan memberikan semangat yang bersifat edukatif agar tetap menjaga solidaritas antar sistem. Untuk mencapai sebuah tujuan bersama seorang komunikator publik dituntut untuk memperhatikan keadaan sebuah sistem atau masyarakat yang tergabung pada sebuah tindakan integratif untuk tujuan bersama. Untuk menentukan isi atau konten komunikasi yang akan disampaikan, seorang komunikator public harus jeli dalam menilai cara kerja system di mana komunikasi public tersebut akan dilakukan. Jika hal tersebut tidak diperhatikan oleh komunikator publik maka kemungkinan-kemungkinan muncul dan berkembangnya ketidakstabilan sistem atau masyarakat akan terjadi di mana hal tersebut terutama disebabkan oleh pesan atau konten komunikasi yang dapat bersifat paradoks dengan apa yang menjadi ide-ide bersama masyarakat.⁷⁰

Dalam kaitannya dengan komunikasi public dalam sebuah entitas politik, proses-proses psikologis terkait dengan jalanya proses politik yang di antaranya meliputi persepsi, kognisi (misalnya, keyakinan, nilai-nilai, repersentasi sosial, sikap, idelogi) sosialisasi, kepemimpinan, identitas social, konflik, komunikasi, otoritarianisme, dan kekuasaan juga turut memainkan peran yang penting dalam menentukan apakah sebuah komunikasi public dapat atau tidak dapat mengubah

⁶⁹ Toto Pribadi dkk. *System Politik Indonesia* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka), 9-12.

⁷⁰ Lihat, John S. Dryzek, Bonnie Honig, and Anne Phillips, eds., *The Oxford Handbook of Political Theory*, Oxford Handbooks of Political Science (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2006).

arah dari sebuah kebijakan public yang bersifat politis. Oleh sebab itu, perilaku-perilaku politik seperti konformitas, gerakan masa, dan afiliasi politik merupakan area yang telah lama menarik perhatian sejumlah ahli psikologi politik.

Martin-Baro dalam Fox dan Prilietensky, misalnya, menyadari bahwa kesadaran atas beragamnya definisi politik seharusnya mendorong lebih banyak orang untuk menekankan pada upaya untuk memenangkan persaingan politik sebagai “prose-proses fisik di mana orang dan kelompok menciptakan, berjuang dan menggunakan kekuasaan yang diperlukan untuk memasukan kepentingan tertentu yang ditentukan secara sosial dalam suatu struktur sosial.⁷¹

Dalam konteks persaingan tersebut, konsep sosialisasi politik yang diperkenalkan oleh seorang sarjana Amerika Herbert Hyman pada tahun 1959 merupakan kata kunci penting untuk memahami keseluruhan gambar dari kekisruhan politik yang muncul dari proses-proses fisik tersebut. Sosialisai politik adalah suatu proses penyerpan nilai dari lingkungan sistem politik ataupun masyarakat terhadap individu atau terhadap masyarakat secara umum. Dalam hal ini, secara umum sosialisasi dapat dilihat sebagai sebuah proses politik di mana interaksi antara penyedia pesan politik dengan calon penerimanya melalui proses tiga lapis, yaitu, kognitif, afektif dan evaluatif. Kognitif adalah proses seseorang memperoleh ilmu pengetahuan, sedangkan ketika pikiran seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan yang diperolehnya merupakan penjelasan dari afektif. Sedangkan ketika telah memasuki proses penilaian maka telah berada pada posisi yang terakhir yaitu evaluatif.⁷²⁷³

Sederhananya, untuk mempengaruhi sebuah sistem kemasyarakatan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek politik dalam entitas tersebut, seorang komunikator politik perlu memahami secara mendalam tentang kompleksitas dari aspek kolektivitas pada masyarakat tersebut. Selain itu, komunikator politik tersebut juga dituntut untuk dapat menampilkan pesan-pesan yang bersifat integratif

⁷¹ Dennis Fox dan Isacc Prilietensky. *Psikologi Kritis* (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika), 211-12.

⁷²Toto Pribadi dkk. *Sistem Politik Indonesia*, 23.

⁷³Untuk penjelasan yang lebih komprehensif mengenai proses tiga-lapis ini silakan merujuk pada, Herbert H. Hyman, *Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behavior*, 1st ed. (London: The Free Press, 1959).

di mana tujuan bersama yang terbangun di antara kelompok-kelompok masyarakat dalam sebuah kesatuan sosiopolitik tersebut bersesuaian dengan narasi besar yang didiktekan oleh ideology yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini, adalah hal yang wajib bagi seorang komunikator publik untuk memahami dengan sangat mendalam aspek psikologi politik dalam sebuah masyarakat sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi sistem atau masyarakat. Jika seorang komunikator publik apatis dengan kondisi psikologi politik yang berkembang di tengah masyarakat maka kemungkinan besar pesan yang disampaikan tidak akan pernah dapat mempengaruhi kebijakan public yang terdapat di sana.

Kegagalan komunikasi politik yang disebabkan oleh kurang memadainya informasi mengenai kondisi psikologi politik yang dimiliki oleh seorang actor komunikasi politik dapat diamati pada fenomena yang terjadi pada masyarakat adat Bayan di Kabupaten Lombok utara (KLU). Pada masyarakat adat ini, sejumlah actor komunikasi politik yang didukung oleh pemerintah selama hampir 3 dekade tidak berhasil mengubah pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan ritual adat yang telah berakulturasi dengan agama (Islam). Aktifitas keagamaan yang bercampur dengan tradisi local masyarakat adat Bayan tersebut adalah ritual *Lebaran Adat* yang dilakukan beberapa hari setelah lebaran idul fitri.

Aktivitas tersebut tetap dipraktikkan setiap tahunnya walaupun sejumlah besar komunikator publik (da'i) menganggap bahwa aktivitas kebudayaan tersebut adalah aktivitas yang tak berguna secara ekonomi dan haram hukumnya dalam pandangan agama Islam. Untuk menjelaskan dan menilai contoh kasus tersebut maka dalam paper ini akan digunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Teori Kemungkinan Elaborasi*.⁷⁴

Richard Petty dan John Cacioppo merupakan psikolog sosial yang mengembangkan teori kemungkinan elaborasi (*Elaboration-Likelihood Theory-ELT*). ELT adalah sebuah teori persuasi karena teori ini mencoba untuk memprediksi kapan dan bagaimana anda akan dan tidak akan terbuju oleh oleh

⁷⁴ Lihat, Richard E. Petty and John T. Cacioppo, *Attitudes and Persuasion Classic and Contemporary Approaches* (Boulder (Colo.): Westview Press, 1996).

pesan. Penguraian kemungkinan ini bergantung pada cara seseorang mengolah pesan. Dalam hal ini terdapat dua rute untuk mengolah informasi, yaitu rute sentral dan rute perifer. Elaborasi atau berfikir secara kritis terjadi pada rute sentral, sementara ketiadaan berfikir secara kritis terjadi pada rute perifer. Meskipun begitu, perlu diingat bahwasanya kecenderungan elaborasi adalah sebuah variable di mana seseorang mungkin akan menggunakan kedua rute tersebut sampai taraf tertentu, bergantung pada dinamika dari faktor motivasi dan faktor kemampuan yang dimiliki orang atau aktor politik tersebut.⁷⁵

Motivasi setidaknya terdiri atas tiga hal. *Pertama*, keterlibatan atau relevansi personal dengan topik yang menjadi subjek yang dielaborasi. Semakin penting topik tersebut bagi seorang aktor politik secara pribadi, kemungkinan bahwa aktor politik tersebut akan semakin kritis terhadap isu yang terlibat akan menjadi semakin benar. Faktor *kedua* dalam motivasi adalah perbedaan pendapat. Aktor-aktor politik yang terlibat dalam sebuah proses politik akan cenderung lebih memikirkan pendapat yang berasal dari beragam sumber. Hal ini terjadi ketika seseorang mendengar beberapa orang yang membicarakan tentang sebuah isu, orang tersebut tidak dapat membuat penilaian dengan sangat mudah. Hal-hal lain menjadi setara, di mana beragam sumber dan pendapat terlibat meskipun penerima cenderung mengolah informasi yang berkaitan secara sentral.

Faktor *ketiga* dalam motivasi adalah kecenderungan pribadi anda terhadap terhadap cara berfikir kritis. Orang yang suka mempertimbangkan pendapat, mungkin akan lebih menggunakan pengolahan secara sentral dari pada mereka yang tidak suka akan hal tersebut. Hal ini akan menjadi keadaan yang sebenarnya dari semua individu dalam hubungannya dengan sifat pertentangan. Tidak bermasalah seberapa termotivasinya anda, tetapi anda tidak akan menggunakan pengolahan sentral kecuali anda banyak mengetahui isu tersebut.⁷⁶

⁷⁵ Richard E. Petty and John T. Cacioppo, "The Elaboration Likelihood Model of Persuasion," in *Communication and Persuasion*, by Richard E. Petty and John T. Cacioppo (New York, NY: Springer New York, 1986), 1–24, http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-4964-1_1.

⁷⁶ Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2008), 108-09.

Jika ditinjau dari pengertian sistem politik di atas maka penulis mendapati dua hubungan komunikasi publik dalam upaya “mempengaruhi” sistem politik yaitu komunikasi public dapat mempengaruhi sistem politik dan juga sebaliknya, yaitu komunikasi public tidak dapat mempengaruhi sistem politik.

C. Komunikasi Publik Dapat Mempengaruhi Sistem Politik

Fenomena di mana serangkaian komunikasi publik dapat mempengaruhi sistem politik dapat dilihat pada fenomena 212 di mana ketika itu penafsiran yang liar dan tidak terkendali atas surat al-Maidah ayat 51 yang dilakukan oleh sejumlah actor-aktor politik yang cukup penting di Indonesia dapat menjadi indikator bahwa pesan politik yang ditransmisikan melalui mekanisme komunikasi publik dapat mempengaruhi, bahkan mengubah, sistem politik.

Secara ideal, Indonesia adalah sebuah Negara yang menganut paham demokrasi sebagai sebuah sistem politik pemerintahan yang mempunyai konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, kekuasaan idealnya berada di tangan rakyat dan apabila dilihat dari pengertian demokrasi tentu semua lapisan masyarakat berhak untuk berpendapat dan mengabdikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa ada batasan-batasan ras, suku, strata social bahkan batasan agama. Selain itu, adalah hal yang bukan tanpa alasan apabila Indonesia menerapkan paham demokrasi menjadi sistem pemerintahan. Indonesia adalah salah satu Negara berkepulauan yang paling plural baik dari aspek agama, budaya, bahasa dan suku yang kesemuanya dapat setiap saat memicu disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, demokrasi merupakan satu-satunya sistem yang pantas untuk mengatur Negara Indonesia dengan segala kompleksitas permasalahannya.⁷⁷

Ketika interpretasi profane terhadap nilai sacral yang terkandung dalam surat al-Maidah, terutama ayat 51, dibungkus dan dipolitisi menjadi pesan politik yang didiseminasi melalui mekanisme komunikasi publik maka sistem politik Indonesia menjadi mulai tak menentu. Dalam konteks gerakan 212 di Jakarta, peristiwa ini dimulai oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (dikenal

⁷⁷Lihat, Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia* (Cambridge University Press, 2013).

sebagai Ahok) di kepulauan seribu tentang al-Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok yang oleh sejumlah kalangan umat Islam, terutama yang berlatar belakang konservatif dan fundamentalis, dianggap sebagai sebuah bentuk penodaan agama. Hal tersebut kemudian menjadi topic yang kontroversial di antara para ulama dan masyarakat di Indonesia, terutama setelah actor politik dari kalangan yang selama ini dikenal radikal seperti Rizieq Shihab juga turut meramaikan kekisruhan politik yang berkembang dari peristiwa tersebut.⁷⁸

Jika dilihat dari teori *Elaboration-Likelihood Theory* (ELT), dapat dipahami bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam kemungkinan dapat termotivasi untuk ikut serta dan terlibat dalam perbincangan public mengenai isu kepemimpinan yang menjadi inti permasalahan yang timbul dari tafsir surah al-Maidah ayat 51 tersebut. Isu atau pesan yang disampaikan oleh komunikator publik dalam konteks interpretasi surat al-Maidah ini dapat menjadi sangat penting bagi kalangan umat Islam terlepas dari posisi dan pemaknaan teologis mereka atas tafsir dari ayat 51 surat al-Maidah itu karena hal tersebut bersinggungan langsung dengan keyakinan teologis-kolektif mereka. Hal inilah yang dapat sedikit memberikan penjelasan mengenai mengapa pesan tersebut secara persuasif mampu mempengaruhi sebuah sistem sehingga terbentuk sebuah gerakan massif untuk bersama-sama mendesak pemerintah bertindak di luar norma politik yang normal.

Gerakan massif tersebut dapat dianggap sebagai gerakan social yang terinspirasi oleh sebuah pesan politik berbau agama yang disampaikan secara intensif melalui mekanisme komunikasi publik sampai pada taraf di mana isi atau pesan komunikasi tersebut dianggap benar dan relevan secara personal dengan topik atau isu yang secara langsung dirasakan masyarakat luas. Dalam hal ini, masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menilai secara kritis kebenaran-kebenaran potensial dari perbincangan tentang adanya kemungkinan penistaan agama oleh Ahok melainkan langsung merasa bahwa Ahok telah

⁷⁸ Penjelasan mengenai bentuk radikalisme yang dianut dan dijalankan oleh FPI dapat dilihat pada Mark Woodward et al., "The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia," *Contemporary Islam* 8, no. 2 (May 2014): 153–71, <https://doi.org/10.1007/s11562-013-0288-1>.

menistakan agama dan karena itu harus segera diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kecendrungan masyarakat atau sebuah sistem juga dapat dipengaruhi bukan hanya dipengaruhi oleh faktor relevannya topik atau isi pesan komunikasi tapi dipengaruhi oleh seberapa seringnya topik tersebut diperbincangkan di lingkungan sekitar. Jika topik atau pesan komunikasi tersebut sering diperbincangkan oleh masyarakat ataupun media masa maka akan secara tidak langsung topik tersebut akan mempengaruhi batas-batas konsensus sosiopolitik yang telah terbentuk di antara kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk sebuah entitas sistem sosiopolitik.

D. Komunikasi Publik Tidak Dapat Mempengaruhi Sistem Politik

Jika dicermati dari pengertian sistem politik diatas maka dapat ditarik pemahaman bahwa tidak semua komunikasi publik dapat mempengaruhi sistem politik secara massif. Dalam hal ini, gagasan-gagasan yang berkaitan dengan politik ide yang berkelindan dengan politik identitas tidak selamanya dapat diterima oleh masyarakat luas karena secara kolektif terdapat kesepakatan bahwa untuk mencapai sebuah keinginan bersama dalam suatu komunitas masyarakat telah tersatukan (dalam kontrak social) oleh nilai-nilai dan norma-norma yang diinternalisasi dalam system kebudayaan (sistem politik diluar pemerintahan).

Kebudayaan dihasilkan oleh suatu perasaan komitmen yang dibangun oleh keseluruhan sistem sosial karena keintiman hubungan timbal balik, kesejahteraan dan kesetia kawan, keramah-tamahan, kekeluargaan dari kelompok kecil, kelompok etnik, organisasi dan oleh seluruh masyarakat. Kebudayaan sebagai konsep sistem sekaligus menerangkan bahwa “keseluruhan” seluruh arti dan makna simbol dapat dibedakan namun arti dan makna simbol-simbol itu tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks ini, manusia hanya dapat membedakan arti dan makna simbol melalui kebudayaan.⁷⁹

⁷⁹ Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 4-5.

Contoh di mana komunikasi tidak dapat mempengaruhi sistem politik, salah satunya, dapat dilihat melalui fenomena Islam Wetu Telu di salah satu kabupaten yang ada di NTB (Nusa Tenggara Barat), yaitu Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pada kasus ini penulis berasumsi bahwa komunikasi publik tidak dapat mempengaruhi sistem politik di mana kontrak social antara kelompok-kelompok masyarakat yang termanifestasi dalam aktifitas-aktifitas kebudayaan yang telah terinternalisasi. Lebih dari itu, pengaruh dari komunikasi publik terhadap system politik juga tidak signifikan dalam mempengaruhi bagaimana sebuah gagasan perubahan social didiskusikan di tengah masyarakat di mana bagian-bagian dari kolektifitas masyarakat tersebut kompak dalam menjaga nilai-nilai kontrak sosial yang mereka anggap sebagai warisan dari leluhur selama beratus ratus tahun lamanya dan masih mempertahankannya.

Islam *Wetu Telu* adalah nama yang disematkan oleh “mereka” yang berada di luar (*Outsider*). *Outsider* dalam posisi ini, dalam contoh fenomena Islam Wetu Telu, umumnya menempati posisi sebagai komunikator publik, salah satunya adalah pendakwah (penceramah) atau da’I yang berdakwah dari masjid ke masjid yang ada di Lombok Utara.

Sejumlah besar komunikator publik seperti da’i, kyai dan Tung Guru di Lombok memberikan justifikasi sepihak bahwa prinsip-prinsip nilai budaya yang dianut oleh kalangan pemeluk Islam Wetu Telu yang termanifestasikan dalam sederet ritual adat yang berperan penting dalam membentuk dan menguatkan solidaritas social sebagai syirik dan menyimpang dari prinsip tauhid dalam agama Islam. Salah satu contoh praktek budaya yang paling sering mendapatkan serangan adalah praktek *Lebaran Adat*.

Pada dasarnya *Lebaran Adat* di kalangan penganut Islam Wetu Telu dirayakan selama dua hari setelah perayaan Idul Fitri. Ritual-ritual dalam kegiatan perayaan tersebut umumnya diasosiasikan dengan sejumlah nilai luhur yang mengandung banyak pelajaran untuk dapat diambil oleh masyarakat yang melaksanakannya. Selain itu, praktek perayaan lebaran adat tersebut juga dapat dilihat sebagai bagian dari usaha masyarakat penganut Islam Wetu Telu untuk mempererat dan memperkuat solidaritas social pada komunitas tersebut.

Pada contoh kasus yang kedua ini, isi atau pesan komunikasi publik yang disampaikan oleh komunikator publik tidak mampu membuat komunikasi atau masyarakat termotivasi oleh karena pesan-pesan tersebut tidak memiliki relevansi yang kuat dengan topik atau persepsi masyarakat yang sudah berakar pada kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan yang terdapat pada masyarakat Bayan yang menganut Islam Wetu Telu, perayaan *lebaran adat* bukanlah semata-mata urusan agama atau budaya melainkan bagian dari usaha masyarakat untuk membangun mengkonsolidasikan kesatuan antar sistem dalam upaya mengapai tujuan bersama di mana prinsip yang paling utama adalah mengedepankan nilai-nilai sosial yang disepakati oleh masyarakat dalam menjalankan interaksi sosial.

Topik atau pesan yang terkandung dalam aktifitas komunikasi publik yang dilakukan oleh para da'i, oleh karena itu, tidak begitu direspon karena topik tersebut tidak dianggap penting, bahkan topik atau isi pesan komunikasi tersebut dianggap dapat mengancam ke-*solid*-an masyarakat dan dapat mendegradasi nilai-nilai kearifan lokal yang mampu merekatkan bagian-bagian dari system sosial untuk tetap bekerja dalam upaya-upaya politis untuk mencapai cita-cita yang telah disepakati bersama dalam kontrak social.

E. Kesimpulan

Dari paparan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang hubungan komunikasi publik dan sistem politik. Komunikasi publik berhubungan dengan sistem politik dalam upaya mempengaruhi sistem dan memberikan informasi yang dianggap penting untuk diterima oleh sebuah system, baik itu informasi tentang gagasan-gagasan ataupun informasi tentang kemajuan sebuah sistem politik. Komunikasi publik dapat mempengaruhi sistem politik apabila pesan yang disampaikan dianggap bermanfaat dan tepat untuk kemajuan sebuah system.

Dalam hal ini, pesan komunikasi publik yang disampaikan kepada khalayak harus kondisional dengan keadaan masyarakat. Pesan komunikasi publik yang disampaikan Habib Rizieq mampu mempengaruhi publik dan mendapat *feed back* yang serius dari masyarakat karena secara psikologis pesan tersebut mampu membuat masyarakat tergerak hatinya untuk menanggapi secara serius masalah

penistaan Al-Quraan yang dilakukan oleh Ahok meskipun topic tersebut masih terbuka untuk dikritisi bahkan ditolak.

Meski demikian, tidak semua komunikasi dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat dalam sebuah sistem politik. Adakalanya komunikasi publik bisa diterima tetapi tak dapat dipatuhi untuk dipraktikan pada masyarakat ataupun pada suatu system. Pesan yang disampaikan oleh komunikator publik (da'i) tentang aktifitas kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat Lombok Utara (KLU) sebagai hal yang mengandung unsur sinkretisme agama tidak begitu berpengaruh terhadap komunitas masyarakat Bayan yang menganut Islam Wetu Telu karena dalam aktivitas kebudayaan tersebut (*lebaran adat*) ada banyak nilai-nilai sosial yang harus tetap dijaga dan dianggap sangat penting bagi eksistensi masyarakat Bayan.

Daftar Pustaka

- Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Athhar, Zaki Yamani. “Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok.” *ULUMUNA* 9, no. 1 (June 10, 2005): 70. <https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.443>.
- Beddy Irawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012
- Birkland, Thomas A. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. 3rd ed. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2010.
- Dennis Fox dan Isacc Prilietensky. *Psikologi Kritis*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2005
- Dryzek, John S., Bonnie Honig, and Anne Phillips, eds. *The Oxford Handbook of Political Theory*. Oxford Handbooks of Political Science. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2006.
- Easton, David, John G Gunnell, and Luigi Graziano. *The Development of Political Science: A Comparative Survey*. London; New York: Routledge, 2002.
- Herbert H. Hyman. *Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behavior*. 1st ed. London: The Free Press, 1959.
- Muhammad Wildan. “Islamism and Democratization in the Post 411 and 212 Rallies of Indonesia.” *Thinking ASEAN*. January 2016.
- Petty, Richard E., and John T. Cacioppo. *Attitudes and Persuasion Classic and Contemporary Approaches*. Boulder (Colo.): Westview Press, 1996.
- . “The Elaboration Likelihood Model of Persuasion.” In *Communication and Persuasion*, by Richard E. Petty and John T. Cacioppo, 1–24. New York, NY: Springer New York, 1986. http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-4964-1_1.
- Stephen W. Litteljhon dan Karen A. Foss, *Teori Komunikasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008
- Toto Pribadi dkk, *Sistem Politik Indonesia*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2014

- Van Aelst, Peter, Jesper Strömbäck, Toril Aalberg, Frank Esser, Claes de Vreese, Jörg Matthes, David Hopmann, et al. "Political Communication in a High-Choice Media Environment: A Challenge for Democracy?" *Annals of the International Communication Association* 41, no. 1 (January 2, 2017): 3–27. <https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551>.
- Vickers, Adrian. *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press, 2013.
- Woodward, Mark, Mariani Yahya, Inayah Rohmaniyah, Diana Murtaugh Coleman, Chris Lundry, and Ali Amin. "The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia." *Contemporary Islam* 8, no. 2 (May 2014): 153–71. <https://doi.org/10.1007/s11562-013-0288-1>.